

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR BAHTERA ARTHA JAYA
TAHUN 2023**



**Jl Proklamator No. 170 A Bandar Jaya
TELEPON: 0725 529151**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Bahtera Artha Jaya pada tahun 2023 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2023 serta masih ada dampak dari COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan.

BPR Bahtera Artha Jaya memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai Standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Bahtera Artha Jaya dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya kota Bandar Jaya. Penerapan Tata Kelola yang baik pada BPR Bahtera Artha Jaya didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh orang bank, baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peran sentral dalam Penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR Bahtera Artha Jaya.

BPR Bahtera Artha Jaya telah beroperasi sejak tahun 1992 dengan nama PT BPR Sumber Pangasean namun telah dilakukan akuisisi tanggal 25 September 2020, dimana telah dilakukan pemenuhan modal inti sesuai ketentuan serta perubahan nama, sejak ini BPR telah melakukan lompatan dan perubahan bisnis yang cukup baik dengan senantiasa menerapkan prinsip - prinsip Tata Kelola dalam setiap usahanya. Prinsip - prinsip Tata Kelola dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini di dorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk mencapai nilai tambah bagi para nasabah.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	Nama	: YUNUS
	Jabatan	: Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya. d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya. e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. f. Menyampaikan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.		
2.	Nama	: HENDRA SIRONI
	Jabatan	: Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
a. Membantu Direktur Utama dalam menjalankan tugas tugasnya khususnya di bidang operasional. b. Bertanggung jawab dalam seluruh proses operasional BPR. c. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku d. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya. d Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya. f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. g. Menyampaikan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.		

<p>h. Tegaknya disiplin dan meningkatnya dedikasi pegawai dengan memberikan tauladan yang baik dalam segala aspek pekerjaan.</p> <p>i. Menjadi Role model dalam penerapan nilai-nilai di BPR.</p> <p>j. Menjaga Tingkat kesehatan BPR agar sesuai dengan standar perbankan yang sehat.</p> <p>k. Melakukan pengawasan dan memastikan setiap karyawan patuh terhadap peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Tata Kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).</p>
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :
-
Penjelasan Lebih Lanjut :
-

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama	: KASWADI
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<p>a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi</p> <p>b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank</p> <p>c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan</p> <p>d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.</p> <p>e. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris.</p>	
2.	Nama	: DAVISKA
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<p>a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi</p> <p>b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank</p> <p>c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan</p> <p>d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.</p> <p>e. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris.</p>	
Rekomendasi Kepada Direksi :		
-		
Penjelasan Lebih Lanjut :		
-		

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Menurut POJK No.4/POJK.03/2015 tentang penerapan tata kelola BPR yaitu BPR yang Memiliki Modal Inti dibawah Rp.80.000.000.000 tidak membentuk komite audit, Dan untuk tugas dan fungsi komite audit dilakukan oleh PE yang ditunjuk oleh Direksi yaitu PE Kepatuhan/SPI	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	nihil	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit
	Program : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2.	Komite Pemantau Risiko
	Program : +
	Realisasi : +

Jumlah Rapat	:	-
3. Komite Remunerasi dan Nominasi		
Program	:	-
Realisasi	:	-
Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut		
Nihil		

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	YUNUS	Rp0	0%
2.	HENDRA SIRONI	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Dewan direksi baik direksi existing maupun direksi yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan saat ini telah disahkan oleh RUPS dan diaktakan tidak memiliki saham BPR.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	YUNUS	-	-	0%
2.	HENDRA SIRONI	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain.				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham

1.	YUNUS	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	HENDRA SIRONI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada hubungan keuangan antara direksi kepada pemegang saham dan kepada komisaris.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	YUNUS	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	HENDRA SIRONI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Direksi tidak ada hubungan keluarga dengan direksi lain, komisaris dan pemegang saham.				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	KASWADI	Rp1.140.000.000	15%
2.	DAVISKA	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Dapat dijelaskan bahwa dewan komisaris yang memiliki saham adalah sdr Kaswadi sebagai Komisaris Utama sebesar 15 % dari total saham yaitu dari total saham sebesar Rp.7.600.000.000 yaitu sebesar Rp.1.140.000.000 sesuai dengan akta no 22 tanggal 14 Juni 2022.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	KASWADI	-	-	0%
2.	DAVISKA	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Sdr Kaswadi memiliki Saham sebanyak 15 % di PT BPR TARA DARMA ARTHA dan tidak mempunyai kepemilikan saham di perusahaan lain.				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	KASWADI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	DWATISYA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Pendapatan Laba Lampa:

Tidak ada hubungan keuangan antar dewan komisaris terhadap direktor pemegang saham dan sesama komisaris.

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	KASWADI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	DWATISYA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Pendapatan Laba Lampa:

SD Dewan adalah adk kandung dari Iain Soewondo Djajmerta yang merupakan pemegang saham pengendali BPR.

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp29.700.000	2	Rp16.400.000
2.	Tunjangan	2	Rp400.000	0	Rp0
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp30.100.000		Rp16.400.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
1. Tunjangan untuk direksi berupa tunjangan pulsa handphone.					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	SEWA RUMAH (2)	Tidak ada
2.	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Semua fasilitas telah ditetapkan dalam RUPS namun fasilitas lain seperti perjalanan dinas dll akan disusulkan dan ditetapkan pada RUPS.			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.05 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.96 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1.4 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Kepangkatan , Grade dan besaran gaji telah dibuat oleh BPR.	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	24 Februari 2023	5	agenda rapat : 1. pembahasan hasil evaluasi kinerja keuangan BPR bulan Januari 2023 2. Pembahasan likuiditas BPR dan penetapan batas minimum ketersediaan likuiditas BPR
2.	27 Juni 2023	5	agenda rapat : 1. Membahas Chart Of Account (COA) BPR Bahtera Artha Jaya 2. Membahas SOP Akutansi BPR Bahtera Artha Jaya
3.	24 Oktober 2023	7	agenda rapat : Pencatatan Laporan Keuangan yang diperkirakan tidak sesuai dengan ketentuan
4.	02 November 2023	6	agenda rapat : Membahas laporan manajemen risiko BPR
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Rapat Dewan komisaris dengan pengurus telah dilaksanakan secara baik dan secara rutin.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	KASWADI	4	0	100%
2.	DAVISKA	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan komisaris sudah melaksanakan rapat secara rutin yang diharapkan. Saat ini dewan komisaris juga hadir secara rutin 1 minggu sekali.				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Sepanjang tahun 2023 tidak ada penyimpangan internal di BPR								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	1
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	1
Penjelasan Lebih Lanjut		
<p>Bank membuat laporan pengaduan ke Polres Lampung Tengah atas tindakan penyerobotan yang dilakukan Eko Handoko terhadap obyek agunan yang diikat hak tanggungan debitur atas nama Dwi Budiyanto.</p> <p>Fasilitas Kredit Dwi Budiyanto telah macet dan akan di Lelang. Dari hasil proses pengaduan tersebut Eko Handoko bersedia untuk mengosongkan obyek agunan dan berdamai dengan Bank. Bank Mencabut Laporan tersebut</p>		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Penerima Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
NIHIL							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
<p>Pertumbuhan bisnis bpr baru bisa menghasilkan laba pada 2 tahun terakhir, sehingga BPR belum melakukan kegiatan sosial secara sendiri hanya memberikan bantuan kecil secara langsung kepada yang membutuhkan atau ikut serta berpartisipasi pada bantuan / kegiatan sosial yang dikoordinir oleh pihak ketiga atau asosiasi. Sementara untuk kegiatan Politik tidak ada.</p>					

BAB III HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama SPR : PT BPR BAHTERA ARTHA JAYA
 Alamat : Jl Proklamator No. 170 A Bandar Jaya
 Nomor Telepon : 0725 529151
 Postal Laporan : Desember 2023
 Model PM : Rp2.975.317.225
 Total Ase : Rp42.972.267.500

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCS PT BPR BAHTERA ARTHA JAYA Tahun 2023, diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai komposit GCS sebesar 1,3 dengan predikat Sangat Baik (S)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (E + F + I)	Nilai (Bobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1,17	0,234
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1,06	0,159
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0,00	0,000
4	Penerapan Peraturan Keperungan	1,50	0,150
5	Penerapan Fungsi Keperungan	1,33	0,133
6	Penerapan Fungsi Audit Sistem	1,62	0,162
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1,60	0,025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2,23	0,223
9	Batas Maksimum Pembiayaan Kredit	1,09	0,075
10	Batasan Bisnis SPR	1,00	0,075
11	Tugas dan Fungsi Komite Keuangan dan Man. Keuangan	1,09	0,075
Nilai Komposit			1,300
Predikat Komposit			Sangat Baik

4. Mekanisme Pelaksanaan Penilaian Mandiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Mandiri (Self Assessment) Manajemen TMS Kelda periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.17)**
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi telah dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dasar serta kerangka yang berlaku.
- 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.06)**
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris telah dilakukan sesuai dengan tata kelola serta kerangka yang berlaku.
- 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)**
gPR telah menyetujui tugas Audit, Fungsi Keperluan, akan segera menyetujui Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi lainnya.
- 4. Perencanaan Beban Kerja Karyawan (Nilai S + P + H : 1.5)**
gPR belum mempunyai kebijakan perencanaan beban kerja karyawan, namun gPR senantiasa memberikan arahan dan arahan dalam dokumentasi setiap ada hal berkaitan perencanaan.
- 5. Penerimaan Fungsi Keputusian (Nilai S + P + H : 1.33)**
- 6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.63)**
- 7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)**
- 8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.23)**
- 9. Hasil Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1)**
- 10. Rencana Bisnis DPR (Nilai S + P + H : 1)**
- 11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1)**

2. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Bandar Jaya, 24 Januari 2024


PT BPR BAHTERA ARTHA JAYA

Disiapkan Oleh




Abi Rosyad Hakim
PE Kepatuhan

Disetujui Oleh



Hendra Sironi
Direktur Operasional YMF Kepatuhan

Disetujui Oleh



Yunus
Direktur Utama

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR BAHTERA ARTHA JAYA
TAHUN 2023**



**Jl Proklamator No. 170 A Bandar Jaya
TELEPON: 0725 529151**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Bahtera Artha Jaya pada tahun 2023 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2023 serta masih ada dampak dari COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan.

BPR Bahtera Artha Jaya memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai Standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Bahtera Artha Jaya dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya kota Bandar Jaya. Penerapan Tata Kelola yang baik pada BPR Bahtera Artha Jaya didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh orang bank, baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peran sentral dalam Penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR Bahtera Artha Jaya.

BPR Bahtera Artha Jaya telah beroperasi sejak tahun 1992 dengan nama PT BPR Sumber Pangasean namun telah dilakukan akuisisi tanggal 25 September 2020, dimana telah dilakukan pemenuhan modal inti sesuai ketentuan serta perubahan nama, sejak ini BPR telah melakukan lompatan dan perubahan bisnis yang cukup baik dengan senantiasa menerapkan prinsip - prinsip Tata Kelola dalam setiap usahanya. Prinsip - prinsip Tata Kelola dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini di dorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk mencapai nilai tambah bagi para nasabah.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	Nama	: YUNUS
	NIK	: 1671012908720001
	Jabatan	: Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku		
b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank		
c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya.		
d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya.		
e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.		
f. Menyampaikan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.		
2.	Nama	: HENDRA SIRONI
	NIK	: 1674012212720004
	Jabatan	: Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
a. Membantu Direktur Utama dalam menjalankan tugas tugasnya khususnya di bidang operasional.		
b. Bertanggung jawab dalam seluruh proses operasional BPR.		
c. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku		
d. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya.		
d Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya.		
f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham		

sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

g. Menyampaikan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.

h. Tegaknya disiplin dan meningkatnya dedikasi pegawai dengan memberikan tauladan yang baik dalam segala aspek pekerjaan.

i. Menjadi Role model dalam penerapan nilai nilai di BPR.

j. Menjaga Tingkat kesehatan BPR agar sesuai dengan standar perbankan yang sehat.

k. Melakukan pengawasan dan memastikan setiap karyawan patuh terhadap peraturan yang berlaku dan sesuai dengan

Tata Kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

-

Penjelasan Lebih Lanjut :

-

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama	: KASWADI
	NIK	: 1871051101610003
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audt dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya. e. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris.	
2.	Nama	: DAVISKA
	NIK	: 1871121912700003
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audt dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya. e. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris.	
Rekomendasi Kepada Direksi :		
-		

Penjelasan Lebih Lanjut :

-

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Menurut POJK No.4/POJK.03/2015 tentang penerapan tata kelola BPR yaitu BPR yang Memiliki Modal Inti dibawah Rp.80.000.000.000 tidak membentuk komite audit, Dan untuk tugas dan fungsi komite audit dilakukan oleh PE yang ditunjuk oleh Direksi yaitu PE Kepatuhan/SPI	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.					
2.					
3.					
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	nihil	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit Program : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -
2.	Komite Pemantau Risiko

Program	:	-
Realisasi	:	-
Jumlah Rapat	:	-
3. Komite Remunerasi dan Nominasi		
Program	:	-
Realisasi	:	-
Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut		
Nihil		

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	YUNUS	1671012908720001	Rp0	0%
2.	HENDRA SIRONI	1674012212720004	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan direksi baik direksi existing maupun direksi yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan saat ini telah disahkan oleh RUPS dan diaktakan tidak memiliki saham BPR.				

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	YUNUS	1671012908720001	-	-	0%
2.	HENDRA SIRONI	1674012212720004	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain.					

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	YUNUS	167101290872000 1	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	HENDRA SIRONI	167401221272000 4	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak ada hubungan keuangan antara direksi kepada pemegang saham dan kepada komisaris.					

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	YUNUS	167101290872000 1	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	HENDRA SIRONI	167401221272000 4	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Direksi tidak ada hubungan keluarga dengan direksi lain, komisaris dan pemegang saham.					

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	KASWADI	1871051101610003	Rp1.140.000.000	15%
2.	DAVISKA	1871121912700003	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dapat dijelaskan bahwa dewan komisaris yang memiliki saham adalah sdr Kaswadi sebagai Komisaris Utama sebesar 15 % dari total saham yaitu dari total saham sebesar Rp.7.600.000.000 yaitu sebesar Rp.1.140.000.000 sesuai dengan akta no 22 tanggal 14 Juni 2022.				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	KASWADI	1871051101610003	-	-	0%
2.	DAVISKA	1871121912700003	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Sdr Kaswadi memiliki Saham sebanyak 15 % di PT BPR TARA DARMA ARTHA dan tidak mempunyai kepemilikan saham di perusahaan lain.					

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	KASWADI	1871051101610003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	DAVISKA	1871121912700003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak ada hubungan keuangan antar dewan komisaris terhadap direksi, pemegang saham dan sesama komisaris.					

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	KASWADI	1871051101610003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	DAVISKA	1871121912700003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Sdr Daviska adalah adik kandung dari istri Soewondo Djajamerta yang merupakan pemegang saham pengendali BPR.					

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS
1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp29.700.000	2	Rp16.400.000
2.	Tunjangan	2	Rp400.000	0	Rp0
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp30.100.000		Rp16.400.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
1. Tunjangan untuk direksi berupa tunjangan pulsa handphone.					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	SEWA RUMAH (2)	Tidak ada
2.	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Semua fasilitas telah ditetapkan dalam RUPS namun fasilitas lain seperti perjalanan dinas dll akan disusulkan dan ditetapkan pada RUPS.			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.05 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.96 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1.4 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Kepangkatan, Grade dan besaran gaji telah dibuat oleh BPR.	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	24 Februari 2023	5	agenda rapat : 1. pembahasan hasil evaluasi kinerja keuangan BPR bulan Januari 2023 2. Pembahasan likuiditas BPR dan penetapan batas minimum ketersediaan likuiditas BPR
2.	27 Juni 2023	5	agenda rapat : 1. Membahas Chart Of Account (COA) BPR Bahtera Artha Jaya 2. Membahas SOP Akutansi BPR Bahtera Artha Jaya
3.	24 Oktober 2023	7	agenda rapat : Pencatatan Laporan Keuangan yang diperkirakan tidak sesuai dengan ketentuan
4.	02 November 2023	6	agenda rapat : Membahas laporan manajemen risiko BPR
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Rapat Dewan komisaris dengan pengurus telah dilaksanakan secara baik dan secara rutin.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	KASWADI	1871051101610003	4	0	100%
2.	DAVISKA	1871121912700003	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Dewan komisaris sudah melaksanakan rapat secara rutin yang diharapkan. Saat ini dewan komisaris juga hadir secara rutin 1 minggu sekali.					

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Sepanjang tahun 2023 tidak ada penyimpangan internal di BPR								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	1
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	1
Penjelasan Lebih Lanjut Bank membuat laporan pengaduan ke Polres Lampung Tengah atas tindakan penyerobotan yang dilakukan Eko Handoko terhadap obyek agunan yang diikat hak tanggungan debitur atas nama Dwi Budiyanto. Fasilitas Kredit Dwi Budiyanto telah macet dan akan di Lelang. Dari hasil proses pengaduan tersebut Eko Handoko bersedia untuk mengosongkan obyek agunan dan berdamai dengan Bank. Bank Mencabut Laporan tersebut		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									
Penjelasan Lebih Lanjut : NIHIL									

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Pertumbuhan bisnis bpr baru bisa menghasilkan laba pada 2 tahun terakhir, sehingga BPR belum melakukan kegiatan sosial secara sendiri hanya memberikan bantuan kecil secara langsung kepada yang membutuhkan atau ikut serta berpartisipasi pada bantuan / kegiatan sosial yang dikoordinir oleh pihak ketiga atau asosiasi. Sementara untuk kegiatan Politik tidak ada.					

Bandar Jaya, 24 Januari 2024

PT BPR BAHTERA ARTHA JAYA

Disiapkan Oleh



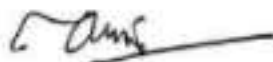
Abi Rosyad Hakim
PE Kepatuhan

Disetujui Oleh



Hendra Sironi
Direktur Operasional YMF Kepatuhan

Disetujui Oleh



Yunus
Direktur Utama

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola
PT BPR BAHTERA ARTHA JAYA Tahun 2023

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR BAHTERA ARTHA JAYA selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Bandar Jaya, 24 Januari 2024

PT BPR BAHTERA ARTHA JAYA

Disiapkan Oleh



Abi Rosyad Hakim
PE Kepatuhan

Disetujui Oleh



Hendra Sironi
Direktur Operasional YMF Kepatuhan

Disetujui Oleh



Yunus
Direktur Utama

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR BAHTERA ARTHA JAYA
Alamat	: Jl Proklamator No. 170 A Bandar Jaya
Nomor Telepon	: 0725 529151
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp5.271.378.652
Total Aset	: Rp42.972.267.520

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR BAHTERA ARTHA JAYA Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.3 dengan predikat Sangat Baik (1)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.17	0.234
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.06	0.159
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.5	0.15
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.33	0.133
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.63	0.163
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.23	0.223
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1	0.075
10	Rencana Bisnis BPR	1	0.075
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1	0.075
Nilai Komposit			1.3
Peringkat Komposit			1
Predikat Komposit			Sangat Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.17)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi telah dilakukan sesuai dengan tata kelola dan anggaran dasar serta ketentuan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.06)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris telah dilakukan sesuai dengan tata kelola serta ketentuan yang berlaku.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

BPR telah memenuhi fungsi Audit, Fungsi Kepatuhan, akan segera memenuhi Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi lainnya.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1.5)

BPR belum mempunyai kebijakan penanganan benturan kepentingan, namun BPR senantiasa memberikan atensi dan dituangkan dalam dokumentasi setiap ada hal benturan kepentingan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.33)

.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.63)

.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)

.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.23)

.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1)

.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1)

.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1)

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Bandar Jaya, 24 Januari 2024

PT BPR BAHTERA ARTHA JAYA

Disiapkan Oleh



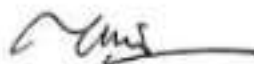
Abi Rosyad Hakim
PE Kepatuhan

Disetujui Oleh



Hendra Sironi
Direktur Operasional YMF Kepatuhan

Disetujui Oleh



Yunus
Direktur Utama

No. : 06/BPR-BAJA/I/2024
Tanggal : 25 Januari 2024
Lampiran : 1 Berkas

Kepada
DPD Perbarindo Lampung
Jl. Pangeran Antasari No. 106 B, A
Bandar Lampung 35214

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola dan Self Assesment Online Perbarindo

Menunjuk perihal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola dan Self Assesment Perbarindo Online. (Terlampir).

Demikian kami sampaikan. Atas Perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR BAHTERA ARTHA JAYA (BANK BAJA)



Hendra Sironi
BANK B **Direktur**
PT. BPR BAHTERA ARTHA JAYA

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT BPR Bahtera Artha Jaya

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Periode Data

2023

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Nomor Referensi

665935-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-601288-25012024095943

User ID Pelugas Pelaporan

yanti.bankbsp@yahoo.com

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-25 09:59:43



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.